



LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA

KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN

2024





PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSDI, ST, M.Si
NIP : 19680215 200112 1 004
Jabatan : Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dengan sepenuhnya untuk melaksanakan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi yang menjadi tanggungjawaban kami, dalam memenuhi kewajiban terhadap penyusunan Laporan Keuangan setiap tahunnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
2. Apabila terbukti kami melanggar isi pakta integritas yang kami buat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

ROSDI, ST, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP.196802152001121004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya perkenankanlah kami menyampaikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan secara luas, tidak terbatas pada manajemen entitas pelaporan tertentu tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Informasi-informasi tersebut selanjutnya disebut dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 yang meliputi penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Bappeda Kota Banda Aceh selalu berusaha menyajikan yang terbaik dan selalu mengikuti perubahan-perubahan kebijakan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, namun kami menyadari bahwa penyajian ini belumlah memberikan hasil yang maksimal. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak guna mencapai perubahan kearah yang lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 09 Januari 2025
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

ROSDI, ST, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP.196802152001121004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	9
BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	11
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
2.2. Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan	17
BAB III. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	19
3.1. Laporan Realisasi Anggaran	19
3.2. Laporan Operasional	22
3.3. Neraca Per 31 Desember	24
BAB IV. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	28
4.1. Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh	28
BAB V Penutup	37



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Lapoaran Keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tata kelola pmerintah yang baik (good governance). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan serta kinerja keuangan.

Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan realisasi anggaran (LRA) , Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bendahara Umum Daerah selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.
- Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bappeda disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Bappeda Kota Banda Aceh menyediakan informasi mengenai Laporan realisasi anggaran (LRA) , Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan realisasi anggaran Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber dana yang dikelola oleh Bappeda Kota Banda Aceh, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

Laporan Neraca Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Bappeda Kota Banda Aceh mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit dari kegiatan operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap serta ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), laporan neraca, laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE).

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Ringkasan Realisasi Belanja dan Kinerja Keuangan Bappeda dalam periode tahun anggaran tertentu, mencakup antara lain :

- Kinerja Bappeda dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ;
- Kinerja pelayanan yang dicapai ;
- Bagian Belanja yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 , Tambahan Lemabran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang/Kekayaan Daerah dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.
29. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh;
30. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 69 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
31. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Banda Aceh No.44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

32. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
33. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;.
34. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
35. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.
36. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab. I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat tentang Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab. II Pencapaian Kinerja Keuangan.

Merupakan bab yang memuat Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, berupa gambaran pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, Tata kelola keuangan daerah, pencapaian kinerja dalam bentuk kerjasama daerah, dan pencapaian kinerja entitas pelaporan terhadap realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Bab.III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.



Merupakan bab yang memuat tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, akuitas dana, serta memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual

Bab.VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab.V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp.10.201.554.624,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.10.201.554.624,- Pemerintah Kota Banda Aceh Merevisi APBK TA.2024 untuk penyesuaian dana transfer sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Pergeseran revisi pertama ditetapkan sebesar Rp. 10.386.852.282,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 10.386.852.282,-. Sedangkan Pada Perubahan Anggaran alokasi belanja Bappeda ditetapkan sebesar Rp. 11.057.345.324,- , dengan alokasi untuk belanja operasi ditetapkan sebesar Rp. 10.890.975.224,- dan belanja modal sebesar Rp. 166.370.100,-.

Realisasi kegiatan yang telah di laksanakan oleh Bappeda per 31 desember 2024 cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.204.451.206,- atau 83,24 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.852.894.118,- atau 16,76 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi. Selain itu tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) menyebabkan sebagian kegiatan yang telah dilaksanakan tidak terbayarkan pada Tahun anggaran 2024 dan akan menjadi hutang pada tahun anggaran 2025.

Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan



Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 2 (dua) urusan, 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) kegiatan serta 35 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 12 Sub kegiatan

2. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada Program Peneliitian Dan Pengembangan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel. 2.1
Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran
Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				RUPIAH	(%)	
1	2	3	4	5	6	4
	BELANJA	Rp 10.201.554.624	Rp 11.057.345.324	Rp 9.204.451.206	83,24%	Rp 1.852.894.118,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.665.814.684	Rp 8.467.580.484	Rp 8.140.140.444	96,13%	Rp 327.440.040
5.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.552.000	Rp 20.552.000	Rp 15.212.000	74,02%	Rp 5.340.000
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 20.552.000	Rp 20.552.000	Rp 15.212.000	74,02%	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 20.552.000	Rp 20.552.000	Rp 15.212.000	74,02%	Rp 5.340.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 11.110.000	Rp 11.110.000	Rp 7.070.000	63,64%	Rp 4.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.442.000	Rp 9.442.000	Rp 8.142.000	86,23%	Rp 1.300.000
5.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.578.531.647	Rp 6.893.470.347	Rp 7.283.956.575	105,66%	Rp (390.486.228)
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.069.671.647	Rp 5.956.210.347	Rp 6.380.168.066	107,12%	Rp (423.957.719)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 6.069.671.647	Rp 5.956.210.347	Rp 6.380.168.066	107,12%	Rp (423.957.719)
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 6.069.671.647	Rp 5.956.210.347	Rp 6.380.168.066	107,12%	Rp (423.957.719)
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 508.860.000	Rp 937.260.000	Rp 903.788.509	96,43%	Rp 33.471.491
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 508.860.000	Rp 937.260.000	Rp 903.788.509	96,43%	Rp 33.471.491
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 97.260.000	Rp 97.260.000	Rp 85.755.000	88,17%	Rp 11.505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 411.600.000	Rp 840.000.000	Rp 818.033.509	97,38%	Rp 21.966.491
5.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 297.867.000	Rp 533.324.000	Rp 373.016.673	69,94%	Rp 160.307.327
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 1.925.000	55,70%	Rp 1.531.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 1.925.000	55,70%	Rp 1.531.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 1.925.000	55,70%	Rp 1.531.000
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 11.690.000	58,45%	Rp 8.310.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 11.690.000	58,45%	Rp 8.310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 11.690.000	58,45%	Rp 8.310.000
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.411.000	Rp 24.411.000	Rp 13.582.000	55,64%	Rp 10.829.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 24.411.000	Rp 24.411.000	Rp 13.582.000	55,64%	Rp 10.829.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 24.411.000	Rp 24.411.000	Rp 13.582.000	55,64%	Rp 10.829.000
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 250.000.000	Rp 485.457.000	Rp 345.819.673	71,24%	Rp 139.637.327
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 250.000.000	Rp 485.457.000	Rp 345.819.673	71,24%	Rp 139.637.327
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 250.000.000	Rp 485.457.000	Rp 345.819.673	71,24%	Rp 139.637.327
5.01.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 50.000.000	Rp 166.370.100	Rp -	0,00%	Rp 166.370.100
5.01.01.2.07.07	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 166.370.100	Rp -	0,00%	Rp 166.370.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.2	BELANJA MODAL	Rp -	Rp 166.370.100	Rp -	0,00%	Rp 166.370.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 166.370.100	Rp -	0,00%	Rp 166.370.100
5.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 460.299.000	Rp 472.931.000	Rp 333.958.129	70,61%	Rp 138.972.871
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 330.680.000	Rp 333.680.000	Rp 269.080.129	80,64%	Rp 64.599.871
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 330.680.000	Rp 333.680.000	Rp 269.080.129	80,64%	Rp 64.599.871
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 330.680.000	Rp 333.680.000	Rp 269.080.129	80,64%	Rp 64.599.871
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 129.619.000	Rp 139.251.000	Rp 64.878.000	50,05%	Rp 74.373.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 129.619.000	Rp 139.251.000	Rp 64.878.000	46,59%	Rp 74.373.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 129.619.000	Rp 139.251.000	Rp 64.878.000	46,59%	Rp 74.373.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				RUPIAH	(%)	
5.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 258.565.037	Rp 380.933.037	Rp 133.997.067	35,18%	Rp 246.935.970
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 226.625.037	Rp 234.097.037	Rp 117.593.067	50,23%	Rp 116.503.970
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 226.625.037	Rp 234.097.037	Rp 117.593.067	50,23%	Rp 116.503.970
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 2.420.000	Rp 2.420.000	Rp -	0,00%	Rp 2.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 224.205.037	Rp 231.677.037	Rp 117.593.067	50,76%	Rp 114.083.970
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 31.940.000	Rp 146.836.000	Rp 16.404.000	11,17%	Rp 130.432.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 31.940.000	Rp 146.836.000	Rp 16.404.000	11,17%	Rp 130.432.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 31.940.000	Rp 146.836.000	Rp 16.404.000	11,17%	Rp 130.432.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.576.814.800	Rp 2.088.759.290	Rp 947.955.762	45,38%	Rp 1.140.803.528
5.01.02.2.01	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.247.728.000	Rp 1.620.395.190	Rp 842.532.762	52,00%	Rp 777.862.428
5.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp 15.920.000	Rp 5.820.000	Rp 970.000	16,67%	Rp 4.850.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 15.920.000	Rp 5.820.000	Rp 970.000	16,67%	Rp 4.850.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 10.100.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.820.000	Rp 5.820.000	Rp 970.000	16,67%	Rp 4.850.000
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 55.338.000	Rp 34.547.000	Rp 28.947.900	83,79%	Rp 5.599.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 55.338.000	Rp 34.547.000	Rp 28.947.900	83,79%	Rp 5.599.100
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 2.020.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 53.318.000	Rp 34.547.000	Rp 28.947.900	83,79%	Rp 5.599.100
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 113.135.000	Rp 39.171.000	Rp 31.629.625	80,75%	Rp 7.541.375
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 113.135.000	Rp 39.171.000	Rp 31.629.625	80,75%	Rp 7.541.375
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 2.420.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 110.715.000	Rp 39.171.000	Rp 31.629.625	80,75%	Rp 7.541.375
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 154.152.000	Rp 118.082.000	Rp 93.572.500	79,24%	Rp 24.509.500
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 154.152.000	Rp 118.082.000	Rp 93.572.500	79,24%	Rp 24.509.500
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 7.260.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 146.892.000	Rp 118.082.000	Rp 93.572.500	79,24%	Rp 24.509.500
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 909.183.000	Rp 1.422.775.190	Rp 687.412.737	48,31%	Rp 735.362.453
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 909.183.000	Rp 1.422.775.190	Rp 687.412.737	48,31%	Rp 735.362.453
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 19.320.000	Rp 19.320.000	Rp 9.660.000	50,00%	Rp 9.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 889.863.000	Rp 1.403.455.190	Rp 677.752.737	48,29%	Rp 725.702.453
5.01.02.2.02	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 97.891.700	Rp 79.891.700	Rp 34.432.000	43,10%	Rp 45.459.700
5.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 97.891.700	Rp 79.891.700	Rp 34.432.000	43,10%	Rp 45.459.700
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 97.891.700	Rp 79.891.700	Rp 34.432.000	43,10%	Rp 45.459.700
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 9.090.000	Rp 9.090.000	Rp 4.040.000	44,44%	Rp 5.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 88.801.700	Rp 70.801.700	Rp 30.392.000	42,93%	Rp 40.409.700
5.01.02.2.03	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 196.467.200	Rp 359.804.500	Rp 70.611.000	19,62%	Rp 289.193.500
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 133.045.200	Rp 306.482.500	Rp 67.541.000	22,04%	Rp 238.941.500
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 133.045.200	Rp 306.482.500	Rp 67.541.000	22,04%	Rp 238.941.500
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 2.420.000	Rp 2.420.000	Rp 1.210.000	50,00%	Rp 1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 130.625.200	Rp 304.062.500	Rp 66.331.000	21,81%	Rp 237.731.500
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 63.422.000	Rp 53.322.000	Rp 3.070.000	5,76%	Rp 50.252.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 63.422.000	Rp 53.322.000	Rp 3.070.000	5,76%	Rp 50.252.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 10.100.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 53.322.000	Rp 53.322.000	Rp 3.070.000	5,76%	Rp 50.252.000
5.01.02.2.04	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 34.727.900	Rp 28.667.900	Rp 380.000	1,33%	Rp 28.287.900
5.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 34.727.900	Rp 28.667.900	Rp 380.000	1,33%	Rp 28.287.900
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 34.727.900	Rp 28.667.900	Rp 380.000	1,33%	Rp 28.287.900
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 6.060.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 28.667.900	Rp 28.667.900	Rp 380.000	1,33%	Rp 28.287.900

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				RUPIAH	(%)	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 365.057.800	Rp 190.698.700	Rp 56.355.000	29,55%	Rp 134.343.700
5.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 186.431.400	Rp 96.199.100	Rp 22.080.000	22,95%	Rp 74.119.100
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 22.546.100	Rp 40.776.200	Rp 2.620.000	6,43%	Rp 38.156.200
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 22.546.100	Rp 40.776.200	Rp 2.620.000	6,43%	Rp 38.156.200
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 4.040.000	Rp 4.040.000	Rp 2.020.000	50,00%	Rp 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 18.506.100	Rp 36.736.200	Rp 600.000	1,63%	Rp 36.136.200
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 116.894.600	Rp 43.827.200	Rp 17.440.000	39,79%	Rp 26.387.200
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 116.894.600	Rp 43.827.200	Rp 17.440.000	39,79%	Rp 26.387.200
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 3.630.000	Rp 3.230.000	Rp 1.210.000	37,46%	Rp 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 113.264.600	Rp 40.597.200	Rp 16.230.000	39,98%	Rp 24.367.200
5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 46.990.700	Rp 11.595.700	Rp 2.020.000	17,42%	Rp 9.575.700
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 46.990.700	Rp 11.595.700	Rp 2.020.000	17,42%	Rp 9.575.700
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 4.040.000	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	100,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 42.950.700	Rp 9.575.700	Rp -	0,00%	Rp 9.575.700
5.01.03.2.02	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 89.354.400	Rp 36.728.400	Rp 14.850.000	40,43%	Rp 21.878.400
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 60.508.000	Rp 25.430.000	Rp 14.850.000	58,40%	Rp 10.580.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 60.508.000	Rp 25.430.000	Rp 14.850.000	58,40%	Rp 10.580.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 3.030.000	Rp 3.030.000	Rp 3.030.000	100,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 57.478.000	Rp 22.400.000	Rp 11.820.000	52,77%	Rp 10.580.000
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 9.636.400	Rp 2.758.400	Rp -	0,00%	Rp 2.758.400
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 9.636.400	Rp 2.758.400	Rp -	0,00%	Rp 2.758.400
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 4.040.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.596.400	Rp 2.758.400	Rp -	0,00%	Rp 2.758.400
5.01.03.2.02.08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 19.210.000	Rp 8.540.000	Rp -	0,00%	Rp 8.540.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 19.210.000	Rp 8.540.000	Rp -	0,00%	Rp 8.540.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 4.040.000	Rp 2.020.000	Rp -	0,00%	Rp 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.170.000	Rp 6.520.000	Rp -	0,00%	Rp 6.520.000
5.01.03.2.03	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 89.272.000	Rp 57.771.200	Rp 19.425.000	33,62%	Rp 38.346.200
5.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 60.307.600	Rp 25.790.000	Rp 11.870.000	46,03%	Rp 13.920.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 60.307.600	Rp 25.790.000	Rp 11.870.000	46,03%	Rp 13.920.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 10.100.000	Rp 4.040.000	Rp 4.040.000	100,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 50.207.600	Rp 21.750.000	Rp 7.830.000	36,00%	Rp 13.920.000
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 14.857.200	Rp 3.295.200	Rp 1.310.000	39,75%	Rp 1.985.200
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 14.857.200	Rp 3.295.200	Rp 1.310.000	39,75%	Rp 1.985.200
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 10.100.000	Rp 1.010.000	Rp 1.010.000	100,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.757.200	Rp 2.285.200	Rp 300.000	13,13%	Rp 1.985.200
5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 14.107.200	Rp 28.686.000	Rp 6.245.000	21,77%	Rp 22.441.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 14.107.200	Rp 28.686.000	Rp 6.245.000	21,77%	Rp 22.441.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 10.100.000	Rp 4.040.000	Rp 3.030.000	75,00%	Rp 1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.007.200	Rp 24.646.000	Rp 3.215.000	13,04%	Rp 21.431.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				RUPIAH	(%)	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 593.867.340	Rp 310.306.850	Rp 60.000.000	19,34%	Rp 250.306.850
5.05.02.2.02	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp 116.612.190	Rp -	Rp -	0,00%	
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Rp 116.612.190	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 116.612.190	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 4.840.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 111.772.190	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.05.02.2.03	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 339.376.600	Rp 178.478.300	Rp 60.000.000	17,68%	Rp 118.478.300
5.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 169.688.300	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00%	Rp -
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 169.688.300	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	0,00%	Rp -
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 9.680.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 160.008.300	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00%	Rp -
5.05.02.2.03.07	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp 169.688.300	Rp 158.478.300	Rp 40.000.000	25,24%	Rp 118.478.300
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 169.688.300	Rp 158.478.300	Rp 40.000.000	0,00%	Rp 118.478.300
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 9.680.000	Rp 8.470.000	Rp -	0,00%	Rp 8.470.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 160.008.300	Rp 150.008.300	Rp 40.000.000	26,67%	Rp 110.008.300
5.05.02.2.04	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 137.878.550	Rp 131.828.550	Rp -	0,00%	Rp 131.828.550
5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 137.878.550	Rp 131.828.550	Rp -	0,00%	Rp 131.828.550
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 137.878.550	Rp 131.828.550	Rp -	0,00%	Rp 131.828.550
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 6.050.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 131.828.550	Rp 131.828.550	Rp -	0,00%	Rp 131.828.550

Dari tabel tersebut dapat dilihat dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.8.467.580.484,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.140.140.444,- atau 96,13 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 3,87 persen. Sedangkan pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.088.759.290,- dapat direalisasikan sebesar Rp.947.955.762,- atau 45,38 persen. Sedangkan Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp.56.355.000,- atau 29,55 persen dari anggaran yang direncanakan. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah hanya terealisasi sebesar 19,34 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2024 sebesar 83,24 persen mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran 2023. Pada Tahun anggaran 2024 terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun tidak terealisasi lagi disebabkan tidak tercapainya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

target pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tidak terbayarkan beberapa kegiatan, sehingga menjadi hutang yang akan dibayarkan pada anggaran Tahun 2025.

Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya sebesar 87,06 persen pertahunnya, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan

Tabel.2.2
Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja
Bappeda Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2020 s/d 2024

URAIAN	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI				
	%				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	97,66	84,33	88,06	82,02	83,24
BELANJA PEGAWAI	103,51	102,53	96,97	99,06	106,23
BELANJA BARANG DAN JASA	88,39	68,84	79,94	64,95	56,56
BELANJA MODAL	91,40	100,00	100,00	0,00	0,00

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2024 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan kenaikan realisasi dari tahun anggaran 2023.

1.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah Ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan/target yang telah ditetapkan di Bappeda sampai dengan triwulan empat tahun 2024, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeure) adalah sebagai berikut:

- Pada sisi program dan kegiatan masih sangat terbatasnya anggaran terutama karena terbatasnya pendapatan asli daerah sehingga dilakukan pembatasan penerbitan surat penyediaan dana (SPD) anggaran, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

sesuai dengan yang direncanakan yang menyebabkan target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

- b. Pada Sisi makro pengaruh berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat dikarenakan lesunya perekonomian daerah, sehingga berkurangnya pendapatan pajak yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah dan mempengaruhi Likuiditas Kas Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan menjadi hutang pada tahun anggaran 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Penjelasan Pos LRA

3.1.1. Belanja

Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Banda Aceh sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.9.204.451.206,00,- atau 83,24 persen dari rencana anggaran sebesar Rp.11.057.345.324,- yang terdiri dari :

RINCIAN BELANJA	2024 (Rp)			2023 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Belanja Operasi	10,890,975,224.00	9,204,451,206.00	84.51	8,553,754,262.00
b. Belanja Modal	166,370,100.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	11,057,345,324.00	9,204,451,206.00	83.24	8,553,754,262.00

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Bappeda Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja operasi dan belanja modal .

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp.6.129.730.347,00,- atau 55,43 persen dari total anggaran Bappeda. Sampai akhir tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 6.511.688.066,00- atau 106,23 persen. Rincian dari realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Rincian Belanja	2024 (Rp)			2023 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Gaji dan Tunjangan	2,778,535,209.00	3,231,970,422.00	116.32	2,863,585,493
2.	Tambahan Penghasilan ASN	3,177,675,138.00	3,148,197,644.00	99.07	2,586,666,878
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	173,520,000.00	131,520,000.00	75.80	58,080,000
	Jumlah Belanja Pegawai	6,129,730,347.00	6,511,688,066.00	106.23	5,508,332,371

Belanja pegawai digunakan untuk membiayai Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja . Dari tabel terlihat realisasi untuk pos belanja Gaji dan Tunjangan mencapai 116,32 persen sedangkan pada pos Tambahan Penghasilan Pegawai realisasinya mencapai 99, 07 persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp.4.761.244.877,00,- atau 43,06 persen dari total anggaran belanja Bappeda. Sampai akhir tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 2.692.763.140,00,- atau 64,95 persen terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.068.481.737,00,- atau 35,05 persen dari total belanja barang dan jasa. Anggaran belanja barang dan jasa digunakan untuk belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan , belanja jasa konsultansi kontruksi, belanja jasa konsultansi non kontruksi, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan belanja perjalanan dinas. Rincian realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja		2024 (Rp)			2023(Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,212,700,137	471,465,062	38.88	590,045,577
2	Belanja Jasa Kantor	2,525,171,740	1,705,087,438	67.52	1,696,369,269
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80,080,000	22,510,967		0
4	Belanja Sewa gedung dan Bangunan	163,000,000	131,476,000	80.66	75,000,000
5	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	60,000,000	0		
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	140,000,000	0	0.00	99,650,000
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64,836,000	16,404,000	25.30	33,283,000
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,000,000	0	0.00	16,404,000
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	485,457,000	345,819,673	71.24	345,819,673
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		4,761,244,877	2,692,763,140	56.56	2,856,571,519

c. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 166.370.100,00- atau 1,50 persen dari total anggaran belanja Bappeda. Sampai akhir tahun anggaran 2024 tidak terealisasi 100 persen hal ini disebabkan tidak diterbitkan surat penyediaan dana (SPD) untuk belanja modal disebabkan terbatasnya Pendapatan Asli Daerah.Rincian alokasi anggaran beanja modal adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2024 (Rp)			2023 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		166,370,100	0	0.00	0
a	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49,023,100	0	0.00	0
b.	Belanja Modal Alat Studio	16,060,000	0		0
c.	Belanja Modal Komputer Unit	58,642,000	0	0.00	0
d.	Belanja Modal Peralatan Komputer	42,645,000	0	0.00	0
Jumlah Belanja Modal		166,370,100	0	0.00	0



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh

A. Status Pembentukan

Perencanaan berfungsi sebagai panduan keseluruhan gerak/langkah pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut, telah dibentuk institusi BAPPEDA yang bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang menyangkut aspek perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1980, pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Kepmendagri nomor 185 tahun 1980, tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II sesuai dengan keputusan Presiden dan keputusan Menteri Dalam negeri tersebut diatas, maka Walikota Banda Aceh telah mengeluarkan keputusan Walikota Banda Aceh nomor 061/390/1981 tanggal 11 November tahun 1981 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh no. 36 tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.



Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah aceh.
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
7. Peraturan Walikota no 62 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh.
8. Peraturan Walikota no 36 tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh

B. Struktur Organisasi

Stuktur organisasi Bappeda yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Badan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

2. Sekretariat, membawahi:

- Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- 1 (satu) Fungsional Perencana
- 1 (satu) Fungsional Analis Keuangan

3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi membawahi ;

- 3 (tiga) Fungsional Perencana ;

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi :

- 2 (dua) Fungsional Perencana ;

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :

- 3 (tiga) Fungsional Perencana ;

6. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi;

- 2 (dua) Fungsional Perencana ;

7. UPTB GIS membawahi;

- 1 (satu) Kepala Tata Usaha



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

C. Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bappeda Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi. Secara keseluruhan, sampai akhir Desember 2024 jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan Kontrak di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh sebanyak 64 orang. 42 pegawai Bappeda sudah berstatus ASN sedangkan 18 orang pegawai berstatus pegawai Kontrak dan 4 orang Tenaga Ahli. Jumlah terbesar ASN pada golongan III/d sebanyak 16 orang, diikuti golongan IV/a sebanyak 15 orang. Dari struktur pegawai hanya 1 orang yang masih berada pada golongan II d, Jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 6.1
Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1		1	
3	IV/a	5	10	15	
4	III/d	8	8	16	
5	III/c	1	2	3	
6	III/b	4	1	5	
7	III/a		-		
8	II/d	1	-	1	
9	II/c	-	-	-	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
	Jumlah Pegawai PNS	21	21	42	
13	Jumlah Pegawai Non ASN Dan Tenaga Ahli	16	6	22	
	JML ASN & NON ASN	37	27	64	



Tingkat kecakapan yang dimiliki dapat dikaji melalui beberapa faktor utama, misalnya derajat pendidikan formal, pengalaman jabatan dan eselonering, kursus-kursus atau latihan jabatan, dan lain-lain. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 26 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 16 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 2 orang dan S3 sebanyak 1 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Bappeda Kota Banda Aceh sebagai sebuah institusi perencanaan.

Tabel.6.2.
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Banda Aceh
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 3	1
2	S 2	16
3	S 1	20
4	D III	3
5	SLTA	2
6	SLTP	-
	Jumlah	42

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bappeda Kota Banda Aceh

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana



wilayah serta tugas-tugas penelitian, pengembangan, pengelolaan data elektronik, dan pengembangan investasi daerah.

1. Tugas

Rincian tugas Bappeda kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan :

1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah
3. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah



4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
5. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang
6. Mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
7. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
8. Meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
9. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah dan;
10. Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

D. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan kerja bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.



2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Banda terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan gampong.
2. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (*feasibility study*) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah.
3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.
4. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
5. Pelayanan ketatausahaan Bappeda Kota Banda Aceh yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.



Beberapa indikator kondisi existing yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

II. Tingkat Penerapan Perencanaan Partisipatif dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah selama ini sudah dijalankan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota. Upaya penjangkaran aspirasi kaum wanita juga dilakukan dengan melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan. Namun demikian, pelaksanaan kedua mekanisme perencanaan partisipatif tersebut (Musrenbang dan Musrena) tidak serta merta memberikan kepuasan kepada masyarakat karena masih banyak usulan masyarakat belum dapat diakomodir. Hal ini karena kendala ketersediaan jumlah anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Selain itu karena adanya kepentingan dan pandangan yang berbeda, antara kebutuhan menurut pandangan masyarakat, dengan kebutuhan menurut pengambil kebijakan. Semua usulan yang telah disepakati dalam Musrenbang Kota Dan Forum OPD akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPD).

III. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kota Banda Aceh menghasilkan beberapa dokumen perencanaan dan sudah diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh OPD. Pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan terbatasnya ketersediaan surat penyediaan dana (SPD) menyebabkan beberapa dokumen tidak dapat terealisasi sesuai output yang direncanakan pada tahun anggaran 2024. Dokumen yang sudah dihasilkan pada tahun anggaran 2024 yaitu :

1. Rancangan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

-
2. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2005-2025,
 3. Laporan Pelaksanaan Musrenbang dan Musrena 2024,
 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJP 2025-2045,
 5. Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) Kota Banda Aceh,
 6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh 2023-2026.
 7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJM



BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan yang disajikan setelah dilakukan konversi sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, yang meliputi Laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau analisis terhadap nilai-nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban Kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Demikian penjelasan secara garis besar mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024. Dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini kami menyadari masih terdapat kekeliruan dan kesilapan dari kami beserta staf, kami sangat mengharapkan koreksi yang positif dan objektif dari para pembaca.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Pengguna Anggaran

ROSDI, ST, M.S.i

Pembina Utama Muda
NIP.196802152001121004

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Urusan Pemerintahan : 5.01. - PERENCANAAN
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : 1

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.057.345.324,00	9.204.451.206,00	1.852.894.118,00	83,24	
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.467.580.484,00	8.140.140.444,00	327.440.040,00	96,13	
5.01.01.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.552.000,00	15.212.000,00	5.340.000,00	74,02	
5.01.01.2.01.0001.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.552.000,00	15.212.000,00	5.340.000,00	74,02	
5.01.01.2.01.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.552.000,00	15.212.000,00	5.340.000,00	74,02	
5.01.01.2.01.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	11.110.000,00	7.070.000,00	4.040.000,00	63,64	
5.01.01.2.01.0001.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.110.000,00	7.070.000,00	4.040.000,00	63,64	
5.01.01.2.01.0001.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	11.110.000,00	7.070.000,00	4.040.000,00	63,64	
5.01.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.442.000,00	8.142.000,00	1.300.000,00	86,23	
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	9.442.000,00	8.142.000,00	1.300.000,00	86,23	
5.01.01.2.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.442.000,00	8.142.000,00	1.300.000,00	86,23	
5.01.01.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.893.470.347,00	7.283.956.575,00	(390.486.228,00)	105,66	
5.01.01.2.02.0001.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.956.210.347,00	6.380.168.066,00	(423.957.719,00)	107,12	
5.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	5.956.210.347,00	6.380.168.066,00	(423.957.719,00)	107,12	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	5.956.210.347,00	6.380.168.066,00	(423.957.719,00)	107,12	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.778.535.209,00	3.231.970.422,00	(453.435.213,00)	116,32	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.190.655.200,00	2.533.757.700,00	(343.102.500,00)	115,66	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.607.544,00	180.551.888,00	(24.944.344,00)	116,03	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.770.000,00	187.200.000,00	(24.430.000,00)	115,01	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.645.000,00	62.885.000,00	(10.240.000,00)	119,45	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.266.100,00	102.981.240,00	(15.715.140,00)	118,01	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.981.328,00	26.279.419,00	(298.091,00)	101,15	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.504,00	30.878,00	(1.374,00)	104,66	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	85.908.875,00	117.464.746,00	(31.555.871,00)	136,73	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.417.868,00	5.204.851,00	(786.983,00)	117,81	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.253.790,00	15.614.700,00	(2.360.910,00)	117,81	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.177.675.138,00	3.148.197.644,00	29.477.494,00	99,07	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.056.828.828,00	1.048.039.704,00	8.789.124,00	99,17	
5.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.120.846.310,00	2.100.157.940,00	20.688.370,00	99,02	
5.01.01.2.02.0002.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	937.260.000,00	903.788.509,00	33.471.491,00	96,43	
5.01.01.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	937.260.000,00	903.788.509,00	33.471.491,00	96,43	
5.01.01.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	97.260.000,00	93.180.000,00	4.080.000,00	95,81	
5.01.01.2.02.0002.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.260.000,00	93.180.000,00	4.080.000,00	95,81	
5.01.01.2.02.0002.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	72.360.000,00	68.280.000,00	4.080.000,00	94,36	
5.01.01.2.02.0002.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	24.900.000,00	24.900.000,00	-	100,00	
5.01.01.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000.000,00	810.608.509,00	29.391.491,00	96,50	
5.01.01.2.02.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	840.000.000,00	810.608.509,00	29.391.491,00	96,50	
5.01.01.2.02.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	840.000.000,00	810.608.509,00	29.391.491,00	96,50	
5.01.01.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	533.324.000,00	373.016.673,00	160.307.327,00	69,94	
5.01.01.2.06.0001.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.456.000,00	1.925.000,00	1.531.000,00	55,70	
5.01.01.2.06.0001.5.1	BELANJA OPERASI	3.456.000,00	1.925.000,00	1.531.000,00	55,70	
5.01.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.456.000,00	1.925.000,00	1.531.000,00	55,70	
5.01.01.2.06.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	3.456.000,00	1.925.000,00	1.531.000,00	55,70	
5.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.456.000,00	1.925.000,00	1.531.000,00	55,70	
5.01.01.2.06.0004.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000,00	11.690.000,00	8.310.000,00	58,45	
5.01.01.2.06.0004.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	11.690.000,00	8.310.000,00	58,45	
5.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.690.000,00	8.310.000,00	58,45	
5.01.01.2.06.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	20.000.000,00	11.690.000,00	8.310.000,00	58,45	
5.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	11.690.000,00	8.310.000,00	58,45	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.01.2.06.0005.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.411.000,00	13.582.000,00	10.829.000,00	55,64	
5.01.01.2.06.0005.5.1	BELANJA OPERASI	24.411.000,00	13.582.000,00	10.829.000,00	55,64	
5.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.411.000,00	13.582.000,00	10.829.000,00	55,64	
5.01.01.2.06.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	24.411.000,00	13.582.000,00	10.829.000,00	55,64	
5.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.411.000,00	13.582.000,00	10.829.000,00	55,64	
5.01.01.2.06.0009.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	485.457.000,00	345.819.673,00	139.637.327,00	71,24	
5.01.01.2.06.0009.5.1	BELANJA OPERASI	485.457.000,00	345.819.673,00	139.637.327,00	71,24	
5.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.457.000,00	345.819.673,00	139.637.327,00	71,24	
5.01.01.2.06.0009.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	485.457.000,00	345.819.673,00	139.637.327,00	71,24	
5.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	485.457.000,00	345.819.673,00	139.637.327,00	71,24	
5.01.01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	166.370.100,00	-	166.370.100,00	-	
5.01.01.2.07.0007.	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	166.370.100,00	-	166.370.100,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2	BELANJA MODAL	166.370.100,00	-	166.370.100,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.370.100,00	-	166.370.100,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.023.100,00	-	49.023.100,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.785.100,00	-	43.785.100,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.238.000,00	-	5.238.000,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.060.000,00	-	16.060.000,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.060.000,00	-	16.060.000,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	101.287.000,00	-	101.287.000,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	58.642.000,00	-	58.642.000,00	-	
5.01.01.2.07.0007.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.645.000,00	-	42.645.000,00	-	
5.01.01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	472.931.000,00	333.958.129,00	138.972.871,00	70,61	
5.01.01.2.08.0002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	333.680.000,00	269.080.129,00	64.599.871,00	80,64	
5.01.01.2.08.0002.5.1	BELANJA OPERASI	333.680.000,00	269.080.129,00	64.599.871,00	80,64	
5.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.680.000,00	269.080.129,00	64.599.871,00	80,64	
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	333.680.000,00	269.080.129,00	64.599.871,00	80,64	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	333.680.000,00	269.080.129,00	64.599.871,00	80,64	
5.01.01.2.08.0004.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	139.251.000,00	64.878.000,00	74.373.000,00	46,59	
5.01.01.2.08.0004.5.1	BELANJA OPERASI	139.251.000,00	64.878.000,00	74.373.000,00	46,59	
5.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.251.000,00	64.878.000,00	74.373.000,00	46,59	
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	136.251.000,00	61.878.000,00	74.373.000,00	45,41	
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	136.251.000,00	61.878.000,00	74.373.000,00	45,41	
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.01.01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	380.933.037,00	133.997.067,00	246.935.970,00	35,18	
5.01.01.2.09.0001.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	234.097.037,00	117.593.067,00	116.503.970,00	50,23	
5.01.01.2.09.0001.5.1	BELANJA OPERASI	234.097.037,00	117.593.067,00	116.503.970,00	50,23	
5.01.01.2.09.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	-	2.420.000,00	-	
5.01.01.2.09.0001.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.000,00	-	2.420.000,00	-	
5.01.01.2.09.0001.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.420.000,00	-	2.420.000,00	-	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.677.037,00	117.593.067,00	114.083.970,00	50,76	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	136.597.037,00	90.827.300,00	45.769.737,00	66,49	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	136.597.037,00	90.827.300,00	45.769.737,00	66,49	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	85.080.000,00	26.765.767,00	58.314.233,00	31,46	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	4.254.800,00	745.200,00	85,10	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80.080.000,00	22.510.967,00	57.569.033,00	28,11	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
5.01.01.2.09.0001.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
5.01.01.2.09.0006.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	146.836.000,00	16.404.000,00	130.432.000,00	11,17	
5.01.01.2.09.0006.5.1	BELANJA OPERASI	146.836.000,00	16.404.000,00	130.432.000,00	11,17	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.836.000,00	16.404.000,00	130.432.000,00	11,17	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	84.836.000,00	16.404.000,00	68.432.000,00	19,34	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.836.000,00	16.404.000,00	38.432.000,00	29,91	
5.01.01.2.09.0006.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.088.759.290,00	947.955.762,00	1.140.803.528,00	45,38	
5.01.02.2.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1.620.395.190,00	842.532.762,00	777.862.428,00	52,00	
5.01.02.2.01.0002.	KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	5.820.000,00	970.000,00	4.850.000,00	16,67	
5.01.02.2.01.0002.5.1	BELANJA OPERASI	5.820.000,00	970.000,00	4.850.000,00	16,67	
5.01.02.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	970.000,00	4.850.000,00	16,67	
5.01.02.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	5.820.000,00	970.000,00	4.850.000,00	16,67	
5.01.02.2.01.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.820.000,00	970.000,00	4.850.000,00	16,67	
5.01.02.2.01.0003.	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	34.547.000,00	28.947.900,00	5.599.100,00	83,79	
5.01.02.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	34.547.000,00	28.947.900,00	5.599.100,00	83,79	
5.01.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.547.000,00	28.947.900,00	5.599.100,00	83,79	
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	28.947.000,00	24.005.400,00	4.941.600,00	82,93	
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.947.000,00	24.005.400,00	4.941.600,00	82,93	
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.600.000,00	4.942.500,00	657.500,00	88,26	
5.01.02.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	4.942.500,00	657.500,00	88,26	
5.01.02.2.01.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	39.171.000,00	31.629.625,00	7.541.375,00	80,75	
5.01.02.2.01.0004.5.1	BELANJA OPERASI	39.171.000,00	31.629.625,00	7.541.375,00	80,75	
5.01.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.171.000,00	31.629.625,00	7.541.375,00	80,75	
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	22.491.000,00	18.220.000,00	4.271.000,00	81,01	
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.491.000,00	18.220.000,00	4.271.000,00	81,01	
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.680.000,00	13.409.625,00	3.270.375,00	80,39	
5.01.02.2.01.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.680.000,00	13.409.625,00	3.270.375,00	80,39	
5.01.02.2.01.0005.	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	118.082.000,00	93.572.500,00	24.509.500,00	79,24	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.02.2.01.0005.5.1	BELANJA OPERASI	118.082.000,00	93.572.500,00	24.509.500,00	79,24	
5.01.02.2.01.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.082.000,00	93.572.500,00	24.509.500,00	79,24	
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	101.322.000,00	81.934.000,00	19.388.000,00	80,86	
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	101.322.000,00	81.934.000,00	19.388.000,00	80,86	
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.760.000,00	11.638.500,00	5.121.500,00	69,44	
5.01.02.2.01.0005.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.760.000,00	11.638.500,00	5.121.500,00	69,44	
5.01.02.2.01.0007.	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.422.775.190,00	687.412.737,00	735.362.453,00	48,31	
5.01.02.2.01.0007.5.1	BELANJA OPERASI	1.422.775.190,00	687.412.737,00	735.362.453,00	48,31	
5.01.02.2.01.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	50,00	
5.01.02.2.01.0007.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.320.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	50,00	
5.01.02.2.01.0007.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	19.320.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	50,00	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.455.190,00	677.752.737,00	725.702.453,00	48,29	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	400.305.000,00	108.123.362,00	292.181.638,00	27,01	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	400.305.000,00	108.123.362,00	292.181.638,00	27,01	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.003.150.190,00	569.629.375,00	433.520.815,00	56,78	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	758.750.190,00	438.153.375,00	320.596.815,00	57,75	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	144.400.000,00	131.476.000,00	12.924.000,00	91,05	
5.01.02.2.01.0007.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
5.01.02.2.02.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	79.891.700,00	34.432.000,00	45.459.700,00	43,10	
5.01.02.2.02.0001.	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	79.891.700,00	34.432.000,00	45.459.700,00	43,10	
5.01.02.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	79.891.700,00	34.432.000,00	45.459.700,00	43,10	
5.01.02.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	9.090.000,00	4.040.000,00	5.050.000,00	44,44	
5.01.02.2.02.0001.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.090.000,00	4.040.000,00	5.050.000,00	44,44	
5.01.02.2.02.0001.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.090.000,00	4.040.000,00	5.050.000,00	44,44	
5.01.02.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.801.700,00	30.392.000,00	40.409.700,00	42,93	
5.01.02.2.02.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	10.096.700,00	392.000,00	9.704.700,00	3,88	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.02.2.02.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.096.700,00	392.000,00	9.704.700,00	3,88	
5.01.02.2.02.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.705.000,00	30.000.000,00	30.705.000,00	49,42	
5.01.02.2.02.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.705.000,00	30.000.000,00	30.705.000,00	49,42	
5.01.02.2.03.	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	359.804.500,00	70.611.000,00	289.193.500,00	19,62	
5.01.02.2.03.0001.	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	306.482.500,00	67.541.000,00	238.941.500,00	22,04	
5.01.02.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	306.482.500,00	67.541.000,00	238.941.500,00	22,04	
5.01.02.2.03.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	50,00	
5.01.02.2.03.0001.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	50,00	
5.01.02.2.03.0001.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.420.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	50,00	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.062.500,00	66.331.000,00	237.731.500,00	21,81	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	66.232.500,00	6.331.000,00	59.901.500,00	9,56	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.232.500,00	6.331.000,00	59.901.500,00	9,56	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	237.830.000,00	60.000.000,00	177.830.000,00	25,23	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	219.230.000,00	60.000.000,00	159.230.000,00	27,37	
5.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-	
5.01.02.2.03.0003.	MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	53.322.000,00	3.070.000,00	50.252.000,00	5,76	
5.01.02.2.03.0003.5.1	BELANJA OPERASI	53.322.000,00	3.070.000,00	50.252.000,00	5,76	
5.01.02.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.322.000,00	3.070.000,00	50.252.000,00	5,76	
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	53.322.000,00	3.070.000,00	50.252.000,00	5,76	
5.01.02.2.03.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.322.000,00	3.070.000,00	50.252.000,00	5,76	
5.01.02.2.04.	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	28.667.900,00	380.000,00	28.287.900,00	1,33	
5.01.02.2.04.0001.	PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	28.667.900,00	380.000,00	28.287.900,00	1,33	
5.01.02.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	28.667.900,00	380.000,00	28.287.900,00	1,33	
5.01.02.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.667.900,00	380.000,00	28.287.900,00	1,33	
5.01.02.2.04.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	19.067.900,00	380.000,00	18.687.900,00	1,99	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.02.2.04.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.067.900,00	380.000,00	18.687.900,00	1,99	
5.01.02.2.04.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	
5.01.02.2.04.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	190.698.700,00	56.355.000,00	134.343.700,00	29,55	
5.01.03.2.01.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	96.199.100,00	22.080.000,00	74.119.100,00	22,95	
5.01.03.2.01.0003.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	40.776.200,00	2.620.000,00	38.156.200,00	6,43	
5.01.03.2.01.0003.5.1	BELANJA OPERASI	40.776.200,00	2.620.000,00	38.156.200,00	6,43	
5.01.03.2.01.0003.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	50,00	
5.01.03.2.01.0003.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.040.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	50,00	
5.01.03.2.01.0003.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.040.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	50,00	
5.01.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.736.200,00	600.000,00	36.136.200,00	1,63	
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	15.536.200,00	600.000,00	14.936.200,00	3,86	
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.536.200,00	600.000,00	14.936.200,00	3,86	
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	21.200.000,00	-	21.200.000,00	-	
5.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	-	21.200.000,00	-	
5.01.03.2.01.0006.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	43.827.200,00	17.440.000,00	26.387.200,00	39,79	
5.01.03.2.01.0006.5.1	BELANJA OPERASI	43.827.200,00	17.440.000,00	26.387.200,00	39,79	
5.01.03.2.01.0006.5.1.01	Belanja Pegawai	3.230.000,00	1.210.000,00	2.020.000,00	37,46	
5.01.03.2.01.0006.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.230.000,00	1.210.000,00	2.020.000,00	37,46	
5.01.03.2.01.0006.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.230.000,00	1.210.000,00	2.020.000,00	37,46	
5.01.03.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.597.200,00	16.230.000,00	24.367.200,00	39,98	
5.01.03.2.01.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	40.597.200,00	16.230.000,00	24.367.200,00	39,98	
5.01.03.2.01.0006.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.597.200,00	16.230.000,00	24.367.200,00	39,98	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.03.2.01.0008.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	11.595.700,00	2.020.000,00	9.575.700,00	17,42	
5.01.03.2.01.0008.5.1	BELANJA OPERASI	11.595.700,00	2.020.000,00	9.575.700,00	17,42	
5.01.03.2.01.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.01.0008.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.01.0008.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.020.000,00	2.020.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.01.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.575.700,00	-	9.575.700,00	-	
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	9.575.700,00	-	9.575.700,00	-	
5.01.03.2.01.0008.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.575.700,00	-	9.575.700,00	-	
5.01.03.2.02.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	36.728.400,00	14.850.000,00	21.878.400,00	40,43	
5.01.03.2.02.0002.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	25.430.000,00	14.850.000,00	10.580.000,00	58,40	
5.01.03.2.02.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.430.000,00	14.850.000,00	10.580.000,00	58,40	
5.01.03.2.02.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.02.0002.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.02.0002.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.030.000,00	3.030.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	11.820.000,00	10.580.000,00	52,77	
5.01.03.2.02.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	22.400.000,00	11.820.000,00	10.580.000,00	52,77	
5.01.03.2.02.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.400.000,00	11.820.000,00	10.580.000,00	52,77	
5.01.03.2.02.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	2.758.400,00	-	2.758.400,00	-	
5.01.03.2.02.0004.5.1	BELANJA OPERASI	2.758.400,00	-	2.758.400,00	-	
5.01.03.2.02.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.758.400,00	-	2.758.400,00	-	
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	2.758.400,00	-	2.758.400,00	-	
5.01.03.2.02.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.758.400,00	-	2.758.400,00	-	
5.01.03.2.02.0008.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	8.540.000,00	-	8.540.000,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.03.2.02.0008.5.1	BELANJA OPERASI	8.540.000,00	-	8.540.000,00	-	
5.01.03.2.02.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	-	2.020.000,00	-	
5.01.03.2.02.0008.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.020.000,00	-	2.020.000,00	-	
5.01.03.2.02.0008.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.020.000,00	-	2.020.000,00	-	
5.01.03.2.02.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	-	6.520.000,00	-	
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	6.520.000,00	-	6.520.000,00	-	
5.01.03.2.02.0008.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.520.000,00	-	6.520.000,00	-	
5.01.03.2.03.	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	57.771.200,00	19.425.000,00	38.346.200,00	33,62	
5.01.03.2.03.0002.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	25.790.000,00	11.870.000,00	13.920.000,00	46,03	
5.01.03.2.03.0002.5.1	BELANJA OPERASI	25.790.000,00	11.870.000,00	13.920.000,00	46,03	
5.01.03.2.03.0002.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.03.0002.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.03.0002.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.040.000,00	4.040.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.03.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	7.830.000,00	13.920.000,00	36,00	
5.01.03.2.03.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	21.750.000,00	7.830.000,00	13.920.000,00	36,00	
5.01.03.2.03.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.750.000,00	7.830.000,00	13.920.000,00	36,00	
5.01.03.2.03.0004.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	3.295.200,00	1.310.000,00	1.985.200,00	39,75	
5.01.03.2.03.0004.5.1	BELANJA OPERASI	3.295.200,00	1.310.000,00	1.985.200,00	39,75	
5.01.03.2.03.0004.5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.03.0004.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.03.0004.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.010.000,00	1.010.000,00	-	100,00	
5.01.03.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.285.200,00	300.000,00	1.985.200,00	13,13	
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	2.285.200,00	300.000,00	1.985.200,00	13,13	
5.01.03.2.03.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.285.200,00	300.000,00	1.985.200,00	13,13	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.01.03.2.03.0008.	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	28.686.000,00	6.245.000,00	22.441.000,00	21,77	
5.01.03.2.03.0008.5.1	BELANJA OPERASI	28.686.000,00	6.245.000,00	22.441.000,00	21,77	
5.01.03.2.03.0008.5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	3.030.000,00	1.010.000,00	75,00	
5.01.03.2.03.0008.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.040.000,00	3.030.000,00	1.010.000,00	75,00	
5.01.03.2.03.0008.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.040.000,00	3.030.000,00	1.010.000,00	75,00	
5.01.03.2.03.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.646.000,00	3.215.000,00	21.431.000,00	13,04	
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	19.846.000,00	3.215.000,00	16.631.000,00	16,20	
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.846.000,00	3.215.000,00	16.631.000,00	16,20	
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
5.01.03.2.03.0008.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	310.306.850,00	60.000.000,00	250.306.850,00	19,34	
5.05.02.2.03.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	178.478.300,00	60.000.000,00	118.478.300,00	33,62	
5.05.02.2.03.0001.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
5.05.02.2.03.0001.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
5.05.02.2.03.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
5.05.02.2.03.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
5.05.02.2.03.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
5.05.02.2.03.0007.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	158.478.300,00	40.000.000,00	118.478.300,00	25,24	
5.05.02.2.03.0007.5.1	BELANJA OPERASI	158.478.300,00	40.000.000,00	118.478.300,00	25,24	
5.05.02.2.03.0007.5.1.01	Belanja Pegawai	8.470.000,00	-	8.470.000,00	-	
5.05.02.2.03.0007.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.470.000,00	-	8.470.000,00	-	
5.05.02.2.03.0007.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.470.000,00	-	8.470.000,00	-	
5.05.02.2.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.008.300,00	40.000.000,00	110.008.300,00	26,67	
5.05.02.2.03.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	25.008.300,00	-	25.008.300,00	-	
5.05.02.2.03.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.008.300,00	-	25.008.300,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran		
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7
5.05.02.2.03.0007.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.000.000,00	40.000.000,00	85.000.000,00	32,00	
5.05.02.2.03.0007.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	47,06	
5.05.02.2.03.0007.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	
5.05.02.2.04.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	131.828.550,00	-	131.828.550,00	-	
5.05.02.2.04.0001.	PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	131.828.550,00	-	131.828.550,00	-	
5.05.02.2.04.0001.5.1	BELANJA OPERASI	131.828.550,00	-	131.828.550,00	-	
5.05.02.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.828.550,00	-	131.828.550,00	-	
5.05.02.2.04.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	6.662.000,00	-	6.662.000,00	-	
5.05.02.2.04.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.662.000,00	-	6.662.000,00	-	
5.05.02.2.04.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	125.166.550,00	-	125.166.550,00	-	
5.05.02.2.04.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.166.550,00	-	125.166.550,00	-	
	JUMLAH BELANJA	11.057.345.324,00	9.204.451.206,00	1.852.894.118,00	83,24	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.057.345.324,00)	(9.204.451.206,00)	(1.852.894.118,00)	-	

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Halaman : 1

No.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
1	<u>ASET</u>		
2	ASET TETAP	8.986.858.497,50	9.043.863.925,00
3	Tanah	6.336.087.000,00	6.336.087.000,00
4	Tanah	6.336.087.000,00	6.336.087.000,00
5	Tanah Persil	6.336.087.000,00	6.336.087.000,00
6	Peralatan dan Mesin	3.150.573.077,00	3.341.430.127,00
7	Alat Besar	297.066.000,00	297.066.000,00
8	Alat Bantu	297.066.000,00	297.066.000,00
9	Alat Angkutan	524.332.854,00	661.334.604,00
10	Alat Angkutan Darat Bermotor	524.332.854,00	661.334.604,00
11	Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.000.000,00	13.000.000,00
12	Alat Ukur	13.000.000,00	13.000.000,00
13	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.153.761.280,00	1.193.716.580,00
14	Alat Kantor	971.065.650,00	971.065.650,00
15	Alat Rumah Tangga	104.425.630,00	141.380.930,00
16	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	78.270.000,00	81.270.000,00
17	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	230.755.000,00	230.755.000,00
18	Alat Studio	156.247.000,00	156.247.000,00
19	Alat Komunikasi	74.508.000,00	74.508.000,00
20	Komputer	931.657.943,00	945.557.943,00
21	Komputer Unit	470.735.281,00	484.635.281,00
22	Peralatan Komputer	460.922.662,00	460.922.662,00
23	Gedung dan Bangunan	3.546.148.000,00	3.546.148.000,00
24	Bangunan Gedung	3.546.148.000,00	3.546.148.000,00
25	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.546.148.000,00	3.546.148.000,00
26	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.601.000,00	123.601.000,00
27	Instalasi	123.601.000,00	123.601.000,00
28	Instalasi Air Bersih/Air Baku	123.601.000,00	123.601.000,00
29	Akumulasi Penyusutan	(4.169.550.579,50)	(4.303.402.202,00)
30	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.930.596.299,50)	(3.138.460.907,00)
31	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.324.668.223,50)	(2.532.532.831,00)
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.680.000,00)	(1.680.000,00)
33	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(536.805.576,00)	(536.805.576,00)
34	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(12.200.000,00)	(12.200.000,00)
35	Akumulasi Penyusutan Komputer	(55.242.500,00)	(55.242.500,00)
36	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.216.451.580,00)	(1.145.528.620,00)
37	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.216.451.580,00)	(1.145.528.620,00)
38	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(22.502.700,00)	(19.412.675,00)
39	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(22.502.700,00)	(19.412.675,00)
40	Jumlah Aset Tetap	8.986.858.497,50	9.043.863.925,00
41	Aset Tidak Berwujud	172.150.000,00	172.150.000,00
42	Aset Tidak Berwujud	172.150.000,00	172.150.000,00

No.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
43	Aset Tidak Berwujud	172.150.000,00	172.150.000,00
44	Aset Lain-lain	6.705.000,00	309.503.762,00
45	Aset Lain-lain	6.705.000,00	309.503.762,00
46	Aset Lain-lain	6.705.000,00	309.503.762,00
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(172.150.000,00)	(172.150.000,00)
48	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(172.150.000,00)	(172.150.000,00)
49	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(172.150.000,00)	(172.150.000,00)
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.705.000,00)	(309.503.762,00)
51	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(6.705.000,00)	(309.503.762,00)
52	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(6.705.000,00)	(309.503.762,00)
53	JUMLAH ASET	8.986.858.497,50	9.043.863.925,00
54	<u>KEWAJIBAN</u>		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	727.367.700,00	-
56	Utang Belanja	727.367.700,00	-
57	Utang Belanja Pegawai	22.990.000,00	-
58	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.990.000,00	-
59	Utang Belanja Barang dan Jasa	693.408.000,00	-
60	Utang Belanja Barang	140.445.700,00	-
61	Utang Belanja Jasa	528.936.300,00	-
62	Utang Belanja Pemeliharaan	24.026.000,00	-
63	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.969.700,00	-
64	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.969.700,00	-
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	727.367.700,00	-
66	JUMLAH KEWAJIBAN	727.367.700,00	-
67	<u>EKUITAS</u>		
68	EKUITAS	8.259.490.797,50	9.043.863.925,00
69	EKUITAS	8.259.490.797,50	9.043.863.925,00
70	Ekuitas	8.259.490.797,50	9.043.863.925,00
71	Ekuitas	8.259.490.797,50	9.043.863.925,00
72	Ekuitas	8.259.490.797,50	9.043.863.925,00
73	JUMLAH EKUITAS	8.259.490.797,50	9.043.863.925,00
74	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.986.858.497,50	9.043.863.925,00

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Halaman : 1

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	EKUITAS AWAL	9.043.863.925,00	9.169.509.968,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.099.824.335,00)	(8.677.400.305,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	248.001.751,50	(2.000.000,00)
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
6	LAIN-LAIN	248.001.751,50	(2.000.000,00)
7	RK PPKD	9.067.449.456,00	8.553.754.262,00
8	EKUITAS AKHIR	8.259.490.797,50	9.043.863.925,00

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Halaman : 1

No.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
4	<u>BEBAN</u>				
5	BEBAN OPERASI	9.920.849.206,00	8.474.969.980,00	1.445.879.226,00	117,06
6	Beban Pegawai	6.534.678.066,00	5.508.332.371,00	1.026.345.695,00	118,63
7	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.231.970.422,00	2.863.585.493,00	368.384.929,00	112,86
8	Beban Gaji Pokok ASN	2.533.757.700,00	2.249.900.420,00	283.857.280,00	112,62
9	Beban Tunjangan Keluarga ASN	180.551.888,00	152.943.220,00	27.608.668,00	118,05
10	Beban Tunjangan Jabatan ASN	187.200.000,00	188.125.320,00	(925.320,00)	99,51
11	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.885.000,00	58.370.000,00	4.515.000,00	107,74
12	Beban Tunjangan Beras ASN	102.981.240,00	97.332.480,00	5.648.760,00	105,80
13	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.279.419,00	7.788.837,00	18.490.582,00	337,40
14	Beban Pembulatan Gaji ASN	30.878,00	29.850,00	1.028,00	103,44
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	117.464.746,00	90.749.378,00	26.715.368,00	129,44
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.204.851,00	4.586.491,00	618.360,00	113,48
17	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	15.614.700,00	13.759.497,00	1.855.203,00	113,48
18	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.148.197.644,00	2.586.666.878,00	561.530.766,00	121,71
19	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.048.039.704,00	677.637.993,00	370.401.711,00	154,66
20	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.100.157.940,00	1.909.028.885,00	191.129.055,00	110,01
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	154.510.000,00	58.080.000,00	96.430.000,00	266,03
22	Beban Honorarium	129.610.000,00	45.630.000,00	83.980.000,00	284,05
23	Beban Jasa Pengelolaan BMD	24.900.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	200,00
24	Beban Barang dan Jasa	3.386.171.140,00	2.966.637.609,00	419.533.531,00	114,14
25	Beban Barang	611.910.762,00	522.308.375,00	89.602.387,00	117,16
26	Beban Barang Pakai Habis	611.910.762,00	522.308.375,00	89.602.387,00	117,16
27	Beban Jasa	2.388.010.705,00	1.883.019.269,00	504.991.436,00	126,82
28	Beban Jasa Kantor	2.022.220.738,00	1.696.369.269,00	325.851.469,00	119,21
29	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	56.830.967,00	-	56.830.967,00	100,00
30	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	149.456.000,00	75.000.000,00	74.456.000,00	199,27
31	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	59.825.000,00	-	59.825.000,00	100,00
32	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.678.000,00	99.650.000,00	28.000,00	100,03
33	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
34	Beban Pemeliharaan	40.430.000,00	232.483.000,00	(192.053.000,00)	17,39
35	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	40.430.000,00	33.283.000,00	7.147.000,00	121,47
36	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	199.200.000,00	(199.200.000,00)	(100,00)
37	Beban Perjalanan Dinas	345.819.673,00	328.826.965,00	16.992.708,00	105,17
38	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	345.819.673,00	328.826.965,00	16.992.708,00	105,17
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi	178.975.129,00	202.430.325,00	(23.455.196,00)	88,41
40	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	104.962.144,00	128.417.340,00	(23.455.196,00)	81,74

No.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
41	Beban Penyusutan Alat Besar	104.962.144,00	128.417.340,00	(23.455.196,00)	81,74
42	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	104.962.144,00	128.417.340,00	(23.455.196,00)	81,74
43	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70.922.960,00	70.922.960,00	-	100,00
44	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	70.922.960,00	70.922.960,00	-	100,00
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.922.960,00	70.922.960,00	-	100,00
46	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.090.025,00	3.090.025,00	-	100,00
47	Beban Penyusutan Instalasi	3.090.025,00	3.090.025,00	-	100,00
48	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.090.025,00	3.090.025,00	-	100,00
49	JUMLAH BEBAN	10.099.824.335,00	8.677.400.305,00	1.422.424.030,00	116,39
50	SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(10.099.824.335,00)	(8.677.400.305,00)	(1.422.424.030,00)	-